

# **ANALISIS HUBUNGAN ANTARA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAKDENGAN PENERIMAAN PAJAK(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PALMERAH)**

**Deddy Arief Setiawan**  
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Akuntansi  
Universitas Trisakti

## **Abstract**

*Taxes revenue is the main source domestic revenue because state revenue from taxation sector is a great deal from side state budget as a whole which decanted in State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The tax reform with the strategy in internal consolidation and canvassing was used by The Directorate General of Taxes (Direktorat Jenderal Pajak) to obtain taxes revenue. The goal of this research is to observe the number of taxpayers and the number of tax payment slip that can influence the tax revenue. The basis of the theory is literature, tax regulation, opinion from researcher or who was expert in the field of taxation. Hypothesis test used The Correlation of Pearson Product Moment Analysis. Recording to the research there is the relationship linearly between the number of taxpayer and the number of tax payment slip with the tax revenue.*  
*Keywords: Taxpayer, Tax Payment Slip, Tax Revenue*

## **LATAR BELAKANG**

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan bagian terbesar dari sisi penerimaan negara secara keseluruhan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, diperlukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Reformasi perpajakan tersebut dijabarkan dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak melalui langkah-langkah strategi Direktorat Jenderal Pajak meliputi (Bahan Sosialisasi "Menuju Single Identification Number, 16 April 2004):

- a. Tahun 2001 : Konsolidasi Internal dan Penyisiran
- b. Tahun 2002 : Kenalilah Wajib Pajakmu
- c. Tahun 2003 : Penegakan Hukum
- d. Tahun 2004 : Bank Data Nasional dan *Single Identification Number*
- e. Tahun 2005 : Menuju Indonesia Sinergi
- f. Tahun 2006 : Indonesia Sinergi
- g. Tahun 2007 : Kemandirian Anggaran Pendapatan & Belanja Negara
- h. Tahun 2008 : Kepastian Hukum Meningkatkan Secara Sistem
- i. Tahun 2009 : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berkurang Secara Sistem
- j. Tahun 2010 : Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan dan Terjamin Secara Sistem

Langkah strategi Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah Konsolidasi Internal dan Penyisiran. Pengukuran keberhasilan penyisiran adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak atau masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga kegiatannya dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Penerimaan pajak meningkat karena adanya pemasukan uang ke kas negara melalui media Surat Setoran Pajak (SSP) yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Perumusan masalah penelitian yang terkait dengan penyisiran atau kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut: apakah jumlah Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak; dan apakah jumlah Surat Setoran Pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk: mengetahui kegiatan penyisiran atau peningkatan jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak; dan untuk mengetahui dampak lanjut penyisiran seperti peningkatan pembayaran pajak yang terlihat dalam jumlah Surat Setoran Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

## LANDASAN TEORI

Sistem pemungutan pajak merupakan metode atau cara melaksanakan pemungutan atas pajak yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan tersebut menjadi salah satu dasar perpajakan yang harus diketahui dan dipahami sebagai landasan pelaksanaan reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri (Pandiangan, 2002) yaitu:

- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

### 1. Hubungan antara Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak kepada setiap Wajib Pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap Wajib Pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat, penerimaan pajak dapat meningkat.

Dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, peningkatan jumlah Wajib Pajak telah menjadi program awal Direktorat Jenderal Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak atau penyisiran. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak wajib dilaksanakan oleh seluruh unit-unit kantor pelayanan pajak melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP), karena dalam rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak, kegiatan yang dijadikan tema adalah program ekstensifikasi dalam rangka peningkatan *tax ratio* dan pengamanan penerimaan pajak

(Majalah Berita Pajak, 1 Desember 2006). Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak selain intensifikasi pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak menurut buku *The Indonesian Tax In Brief* (2006) diuraikan bahwa *extension means trying to locate them who are actually capable to pay taxes, but still do not perform their taxation yet. This action is implemented by conducting canvassing*. Kemudian dibuku yang sama (2006) dijelaskan kegiatan penyisiran dalam rangka meningkatkan penerimaan dari Wajib Pajak Orang pribadi, yaitu:

Canvassing activity was focused on some individuals who have luxurious assets, retail sellers, family head who lives in exclusive housing, employee who holds income more than personal exemption, passport holder, credit card holder who has the limit above 10 million rupiahs. It was directed to cover individuals who actually have the potency to pay taxes but not yet covered, and to extend taxes collected from Individual Taxpayer which current portion are still smaller than taxes collected from corporate Taxpayers.

Dalam Harian Kompas (Senin, 2 April 2001) pada bagian judul "*Pajak Dijaring Lewat Kartu Keluarga*", dijelaskan bahwa:

"Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) Hadi Purnomo mengatakan, untuk menjangkau Wajib Pajak (WP) baru, pemerintah akan mewajibkan pemilik Kartu Keluarga (KK) dan pemilik kartu kredit dengan nominal Rp 10 juta, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP juga wajib dimiliki oleh mereka yang ingin mendapatkan paspor, membeli mobil seharga lebih dari Rp 200 juta, membangun rumah senilai Rp 1 milyar, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau di atas Rp 2,8 juta per tahun dan atau Rp 240.000 per bulan".

Kemudian di alinea lainnya (Harian Kompas, 2 April 2001), dijelaskan bahwa:

"Ini merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak dilakukan melalui perluasan subjek dan objek pajak."

Perluasan subjek pajak dilakukan melalui kerja sama dengan Rukun

Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) di masing-masing kelurahan. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan menindaklanjuti dengan mengadakan kerjasama dengan para Gubernur dan Walikota/Bupati atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Akses yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah mendapatkan Kartu Keluarga. Keinginan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kartu Keluarga tersebut adalah penambahan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak. Kolom tersebut dapat diisi dengan mencantumkan pendapatan atau penghasilan kepala keluarga/suami atau gabungan antara suami dan isteri yang diterima atau diperoleh setiap bulan atau tahun.

Dalam rangkuman Laporan Tahunan 2002 dengan judul "Kenali Wajib Pajakmu (*Knowing Your Taxpayer*)" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (31 Desember 2002), terdapat kaitannya antara kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak, yaitu:

Langkah yang diambil DJP dalam merealisasikan target penerimaan adalah melalui penetapan sejumlah kebijakan di bidang PPh, PPN, PBB dan pajak lainnya.

A. Kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2002 antara lain:

a. Kebijakan di bidang PPh meliputi:

1. Upaya ekstensifikasi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah;
2. Mewajibkan kepada setiap orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjadi Wajib Pajak;
3. Menggiatkan upaya guna mendapat akses terhadap lalu lintas devisa dan pencatatan transaksi keuangan untuk tujuan monitoring;
4. Pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan *on-line* antar unit-unit terkait (MP3);
5. Pembentukan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar.

Keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan di bidang PPh dapat diukur secara kuantitatif melalui realisasi penerimaan pajak tahun 2002 dan realisasi penerimaan pajak tersebut dibandingkan dengan tahun 2001. Berikut ini penjelasan realisasi penerimaan pajak yang berumber dari Laporan Tahunan 2002.

.....realisasi penerimaan dalam tahun 2002 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2001. Pajak Penghasilan meningkat sebesar 8% (dari Rp. 94.576,0 miliar menjadi Rp. 101.873,5 miliar), PPN meningkat sebesar 16% (dari 55.957,0 miliar menjadi Rp. 65.153,0 miliar), PBB dan BPHTB meningkat sebesar 17% (dari Rp. 6.662,9 miliar menjadi Rp. 7.827,7 miliar), dan Pajak Lainnya

meningkat sebesar 6% (dari Rp. 1.383,9 miliar menjadi Rp. 1.469,1 miliar).

## 2. Hubungan antara Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak atau penyisiran berdampak pada jumlah Surat Setoran Pajak, karena Surat Setoran Pajak merupakan sarana pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak ke kas negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Penghasilan Pasal 15, harus disetor ke kas negara dengan media Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak tersebut digunakan untuk pembayaran atau penyetoran masa, pendahuluan surat ketetapan pajak, tahunan, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Seperti halnya Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, Wajib Pajak Badan dapat membayar atau menyetor perpajakannya dengan kode jenis setoran sebagai berikut:

- a. Jenis setoran 100 untuk pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan;
- b. Jenis setoran 199 untuk pembayaran pendahuluan surat ketetapan pajak PPh Pasal 25 Badan;
- c. Jenis setoran 200 untuk pembayaran tahunan PPh Badan;
- d. Jenis setoran 300 untuk pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Badan;
- e. Jenis setoran 310 untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan;
- d. Jenis setoran 320 untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh Badan.

Bukti setoran SSP merupakan tanda bukti lunas pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tertib administrasi dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak terhadap bukti setoran atau pembayaran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *on-line*, yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2003. Seluruh penerimaan pajak oleh bank-bank persepsi harus dilakukan melalui Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *on-line*. Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *on-line* dapat memberikan informasi pelaporan pembayaran pajak semakin akurat, sehingga hal tersebut memudahkan pelayanan lanjutan terhadap Wajib Pajak, misalnya dalam hal pemeriksaan, dan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak. Berikut ini dapat diketahui beberapa keuntungan pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang dikutip dari Laporan Tahunan 2003 dengan judul *Laporan Tahunan 2003; "Penegakan Hukum (Law Enforcement)"* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (31 Desember 2003) sebagai berikut:

Beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui fasilitas MP3 secara *on-line*, yaitu:

- a. Mengurangi persentuhan antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang dapat menimbulkan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme);
- b. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan tercatat secara akurat dan *real time* (pada saat pembayaran pajak dilakukan), sehingga dapat segera diketahui jumlah kredit pajak yang menjadi hak Wajib Pajak;
- c. Mengurangi peredaran SSP/SSB palsu;
- d. Wajib Pajak akan merasa aman dalam perjalanan menuju tempat pembayaran, karena pembayaran pajak secara *on-line* dapat dilakukan melalui ATM, *teller*, *internet banking*, *standing instruction* dan sarana lain yang disediakan oleh Bank.

Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak tersebut, akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak, yang pada akhirnya akan menunjukkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

### 3. Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis atas variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Hipotesis Pertama

H<sub>0</sub>1: Jumlah Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak?

H<sub>a</sub>1: Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak?

#### b. Hipotesis Kedua

H<sub>0</sub>2: Jumlah Surat Setoran Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak?

H<sub>a</sub>2: Jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak?

## METODE PENELITIAN

### 1. Rancangan Penelitian

Penulis memilih metodologi penelitian kuantitatif dalam penelitian ini karena adanya rumusan hipotesis yang harus dilakukan pengujian dengan menetapkan variabel bebas atau *independent variable* dan variabel tidak bebas atau *dependent variable*, yang kemudian variabel-variabel tersebut diukur berdasarkan pengukuran skala dan diuji berdasarkan metode analisis. Dalam metodologi penelitian kuantitatif, proses pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui metode observasi atau metode pengamatan lapangan, penelitian *survey* dan penelitian eksperimen.

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian pengujian hipotesis terkait dengan proses pengambilan keputusan atau kesimpulan. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya menjelaskan karakteristik hubungan-hubungan tertentu atau perbedaan-perbedaan antar kelompok atau independensi dari dua faktor atau lebih dalam suatu situasi (Hermawan, 2003). Hubungan tersebut adalah adanya suatu pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat yang terjadi dalam suatu pengamatan dilapangan dan landasan teori yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini.

### 2. Populasi Penelitian

Populasi (Kuncoro, 2003) adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Populasi (Sugiyono, 2003) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, populasi yang menjadi objek penelitian dapat berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang mempunyai wilayah generalisasi, mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data *time series* berupa data bulanan yang diambil langsung dari sumber datanya, yaitu bersumber dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), SIP Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), SIP Web Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan SIP Web Direktorat Jenderal Pajak atau Monitoring Pelaporan Penyetoran Pajak (MP3).

Rincian populasi penelitian agar dapat menguji rumusan hipotesis terdiri atas:

- a. Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Periode Januari 2002 sampai dengan Desember 2006, terbagi menjadi:
  1. Jumlah penerimaan dalam rupiah seluruh jenis pajak,
  2. Jumlah pengeluaran atau SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak), dan
  3. Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) seluruh jenis pajak.
- b. Data Statistik "Master File Lokal" Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Periode Januari 2002 sampai dengan Desember 2006, terbagi menjadi:
  1. Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data atau *record* Aktif/Normal (00);
  2. Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data atau *record* Perbaikan Data (UP);
  3. Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data atau *record* Pindah Masuk (PB);
  4. Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data atau *record* Data Baru (PE); dan
  5. Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data atau *record* Lainnya (...).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer (Kuncoro, 2003) adalah data yang diperoleh dengan *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data primer, adalah:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan lapangan atau pengamatan langsung terhadap kegiatan, data dan dokumen seperti mengamati *input* data Wajib Pajak untuk status data atau *record* Perbaikan Data (UP), Pindah Masuk (PB) maupun Data Baru (PE).
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), SIP Tempat Pelayanan Terpadu (IPT), SIP Web Seksi Pengolahan Data dan Informasi, serta SIP Web Direktorat Jenderal Pajak seperti data MP3 atau Monitoring Penyetoran Pelaporan Pajak.

Data sekunder (Kuncoro, 2003:127) adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder, adalah melalui perpustakaan, yaitu mencari, membaca dan mencatat, yang kemudian diolah dan dijadikan sebagai informasi-informasi yang mendukung data primer, seperti: buku, majalah, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, mengenai teori-teori dan hukum perpajakan yang mendukung seperti pembahasan sebagai bahan untuk menetapkan tinjauan pustaka dan kerangka teoritisnya.

#### 4. Penentuan Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:

- a. Variabel tidak bebas (Kuncoro, 2003) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel ini adalah Penerimaan Pajak, dengan disimbolkan  $Y_1$ .
- b. Variabel bebas (Kuncoro, 2003) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel tidak bebas dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel tidak bebasnya tersebut. Variabel ini adalah:
  1. Jumlah Wajib Pajak, dengan simbol  $X_1$ ; dan
  2. Jumlah Surat Setoran Pajak, dengan simbol  $X_2$ ;

Dalam mendapatkan nilai yang kuantitatif, variabel tidak bebas dan variabel bebas yang telah disebutkan tersebut perlu dilakukan pengukuran skalanya. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:

1. Variabel tidak bebas adalah Penerimaan Pajak atau  $Y_1$  dengan menggunakan nilai rupiah, skala pengukurannya menggunakan skala rasio. Skala rasio (Santoso dan Ashari, 2005:5) merupakan jenis skala yang tertinggi dimana skala ini memiliki skala interval ditambah dengan ciri memiliki nilai nol sebagai nilai mutlak. Komponen penerimaan pajak terdapat jenis pajak yang mempunyai nilai nol, namun nilai tersebut mempunyai pengertian bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari jenis pajak yang dimaksud tidak ada nilai jenis pajak.
2. Variabel bebas meliputi:
  - a. Jumlah Wajib Pajak atau  $X_1$  dengan menggunakan satuan lembar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), skala pengukurannya menggunakan skala interval. Skala interval (Santoso dan Ashari, 2005:4) adalah skala yang memiliki ciri-ciri skala ordinal tetapi jarak dari masing-masing data bisa diukur. Dalam jumlah Wajib Pajak, menyebutkan bahwa nilai nol tidak ada sama sekali.
  - b. Jumlah Surat Setoran Pajak atau  $X_2$  dengan menggunakan satuan

lembar surat yang telah mendapatkan validasi dari penerima pembayaran pajak, yaitu bank persepsi atau bank pemerintahan dan kantor pos dan giro, skala pengukurannya menggunakan skala interval. Dalam jumlah Surat Setoran Pajak, menyebutkan bahwa nilai nol tidak ada sama sekali.

## 5. Metode Analisis Data

### 5.1. Pengujian Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif menggambarkan populasi penelitian yang meliputi: nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau *mean*, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian, yaitu:

- a. Penerimaan Pajak, dengan disimbolkan  $Y_1$ ;
- b. Jumlah Wajib Pajak, dengan simbol  $X_1$ ; dan
- c. Jumlah Surat Setoran Pajak, dengan simbol  $X_2$ ;

### 5.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis korelasi. Analisis korelasi (Uyanto, 2006:191) yaitu ukuran hubungan (*relationship*) antara dua variabel, terutama untuk variabel kuantitatif. Dalam program SPSS Versi 12, korelasi yang menggunakan skala interval dan skala ratio dapat digunakan koefisien korelasi *Pearson Product Moment*. Beberapa asumsi yang digunakan apabila dilakukan analisis korelasi *Pearson Product Moment* (Wahana Komputer, 2006) antara lain:

1. Distribusi nilai dari variabel berdistribusi normal atau mendekati normal.
2. Dua variabel yang akan dicari korelasinya adalah variabel kontinu yang bersifat rasional atau minimal bersifat interval.
3. Hubungan dari dua variabel adalah linier.

Dalam SPSS Versi 12, asumsi pertama (butir 1) dapat diketahui dengan menggunakan uji normalitas. Asumsi normalitas merupakan prasarat kebanyakan prosedur statistik. Dalam bukunya Uyanto (2006) menyebutkan bahwa:

Ada beberapa cara untuk mengeksploitasi asumsi normalitas ini antara lain: Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* dan Uji Normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* yang terdapat dalam prosedur SPSS *Explore*. Dalam prosedur SPSS *Explore* juga akan ditampilkan secara grafis *normal probability plot* dan *detrended normal plot*.

Pengujian hipotesis terhadap normalitas data yang dimaksud menggunakan Uji Normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* dengan  $\alpha = 5\%$ . Pengujian tersebut adalah:

$H_0$  : data berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

$H_1$  : data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

Dalam pengujian hipotesis tersebut, kriteria untuk menolak atau tidak menolak  $H_0$  berdasarkan  $P\text{-value} = sig$  adalah sebagai berikut:

1. Jika  $P\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak.
2. Jika  $P\text{-value} \geq \alpha$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

Sedangkan asumsi ketiga (butir 3) dapat diketahui dengan menggunakan tabel *regression disubstans curve estimation*. Hubungan linier (Santoso dan Ashari, 2005) adalah hubungan dimana jika satu variabel mengalami kenaikan atau penurunan, maka variabel yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Pengujian hipotesis hubungan linier pada SPSS Versi 12 dengan  $\alpha = 5\%$ , sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

$H_1$  : Ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis tersebut, kriteria untuk menolak atau tidak menolak  $H_0$  berdasarkan  $P\text{-value} = sig$  pada program SPSS adalah sebagai berikut:

1. Jika  $P\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak.
2. Jika  $P\text{-value} \geq \alpha$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

Kemudian penelitian diteruskan dengan menghitung korelasi *Pearson Product Moment*, pengujian hipotesisnya pada SPSS Versi 12 dengan  $\alpha = 5\%$ , sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

$H_1$  : Ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak  $H_0$  berdasarkan  $P\text{-value} = sig$  pada program SPSS adalah sebagai berikut:

1. Jika  $P\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak.
2. Jika  $P\text{-value} \geq \alpha$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

Ukuran korelasi dapat dinyatakan sebagai berikut (Sulaiman, 2004):

1. 0,70 s.d. 1,00 (baik plus maupun minus) menunjukkan adanya tingkat hubungan yang tinggi.

2. 0,40 s.d. <0,70 (baik plus maupun minus) menunjukkan adanya tingkat hubungan yang substansial.
3. 0,20 s.d. <0,40 (baik plus maupun minus) menunjukkan adanya tingkat hubungan yang rendah.
4. <0,70 (baik plus maupun minus) menunjukkan tidak adanya tingkat hubungan.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Hubungan antara Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak

Gambaran umum data statistik "Master File Lokal" Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah dapat dijelaskan melalui hitungan jumlah dan pertumbuhan jumlahnya. Pertumbuhan tersebut meliputi jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Aktif dan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dengan dasar perhitungan jumlah Wajib Pajak yang aktif tahun 2002, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang aktif tahun 2003 mengalami kenaikan yang paling besar, yaitu 13,87% dengan jumlah 10.811 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak yang aktif tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang paling kecil, yaitu 9,93% dengan jumlah 14.591 Wajib Pajak. Laju pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang aktif hampir sama dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak. Garis linier jumlah Wajib Pajak yang aktif dapat dilihat pada Grafik 1 dan garis pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang aktif dapat dilihat pada Grafik 2.

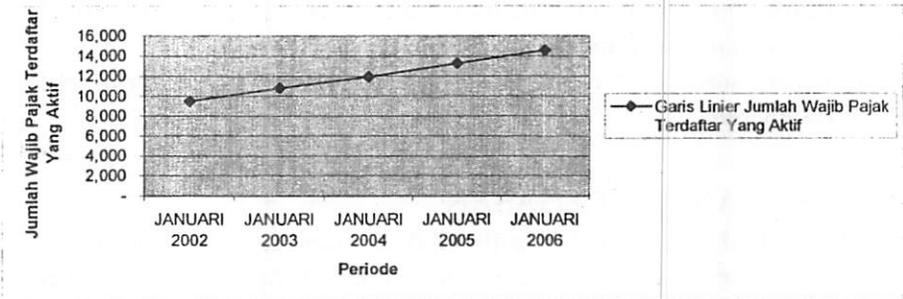
Tabel 1.  
Data Statistik "Master File Lokal"  
Tahun 2002 sampai dengan 2006

No.	Bulan	Jumlah Data Wajib Pajak Aktif *)			Pertumbuhan
		Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah	
1.	2002	4,020	5,474	9,494	
2.	2003	4,450	6,361	10,811	13.87%
3.	2004	4,848	7,076	11,924	10.30%
4.	2005	5,229	8,044	13,273	11.31%
5.	2006	5,640	8,951	14,591	9.93%

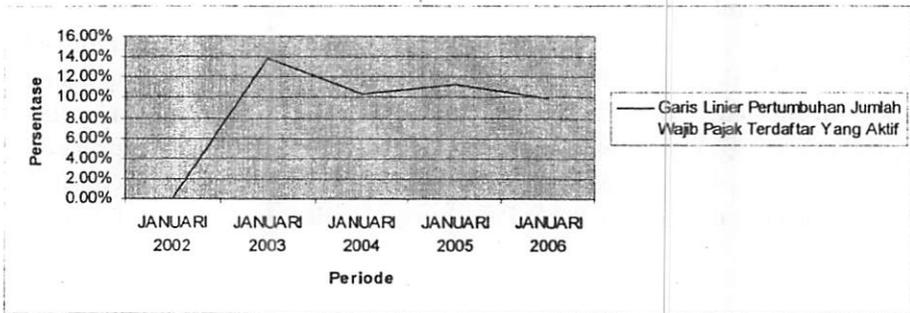
Keterangan :

\*) Perhitungan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berdasarkan data per awal bulan seperti tahun 2002 adalah data per 1 Januari 2002

Grafik 1  
Data Statistik "Master File Lokal" KPP Jakarta Palmerah  
Tahun 2002 s.d. 2006



Grafik 2  
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Yang Aktif



Analisis hubungan antara Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak dilakukan dengan melakukan pengujian statistik melalui hubungan Wajib Pajak Badan Aktif dan Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif terhadap Penerimaan Pajak meliputi dua pengujian, yaitu:

## 2. Pengujian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 2, dimana jumlah masing-masing data (Wajib Pajak Badan Aktif, Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif dan Penerimaan Pajak) adalah 60 (enam puluh), sehingga tidak ada data yang hilang. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata atau *mean*, nilai standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing data tersebut.

Tabel 2.

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
WP BADAN AKTIF	60	5041.70	600.591	4020	6082
WP OP AKTIF	60	7598.23	1206.966	5474	9603
PENERIMAAN PAJAK	60	45633.87	11356.09500	24520.03	71291.37

Sumber: Hasil *print-out* Program SPSS Versi 12

**b. Pengujian Korelasi Pearson Product Moment**

Sebelum data diuji dengan korelasi *Pearson Product Moment*, data diuji normalitasnya atau hubungan linieritasnya. Pengujian Normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			WP BADAN AKTIF	WP OP AKTIF	PENERIMAAN PAJAK
N			60	60	60
Normal Parameters	a, b	Mean	5041.70	7598.23	45633.8683
		Std. Deviation	600.591	1206.966	11356.09500
Most Extreme Differences		Absolute	.062	.097	.125
		Positive	.062	.084	.125
		Negative	-.062	-.097	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		.483	.749	.965	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.974	.629	.310	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil *print-out* Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian Normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* adalah sebagai berikut:

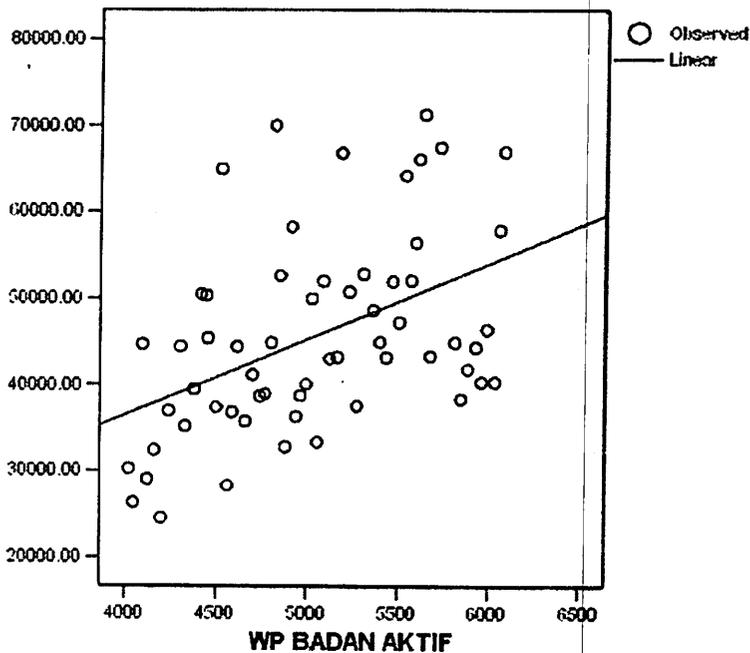
- 1). Wajib Pajak Badan Aktif mempunyai *P-value=sig.* sebesar 97,4% sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak, karena *P-value=sig.* lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.
- 2). Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif mempunyai *P-value=sig.* sebesar 62,9% sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak, karena *P-value=sig.* lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.
- 3). Penerimaan Pajak mempunyai *P-value=sig.* sebesar 31,0% sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak, karena *P-value=sig.* lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.

Sedangkan hubungan linieritas dapat dilihat dari masing-masing hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini rincian masing-masing hubungan linieritas, sebagai berikut:

- 1). Variabel Wajib Pajak Badan Aktif terhadap Penerimaan Pajak dapat dilihat pada Grafik 1. Hubungan ini mempunyai  $P\text{-value}=\text{sig.}$  sebesar 0,02% sehingga  $H_0$  ditolak, karena  $P\text{-value}=\text{sig.}$  lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

Grafik 3.

### PENERIMAAN PAJAK

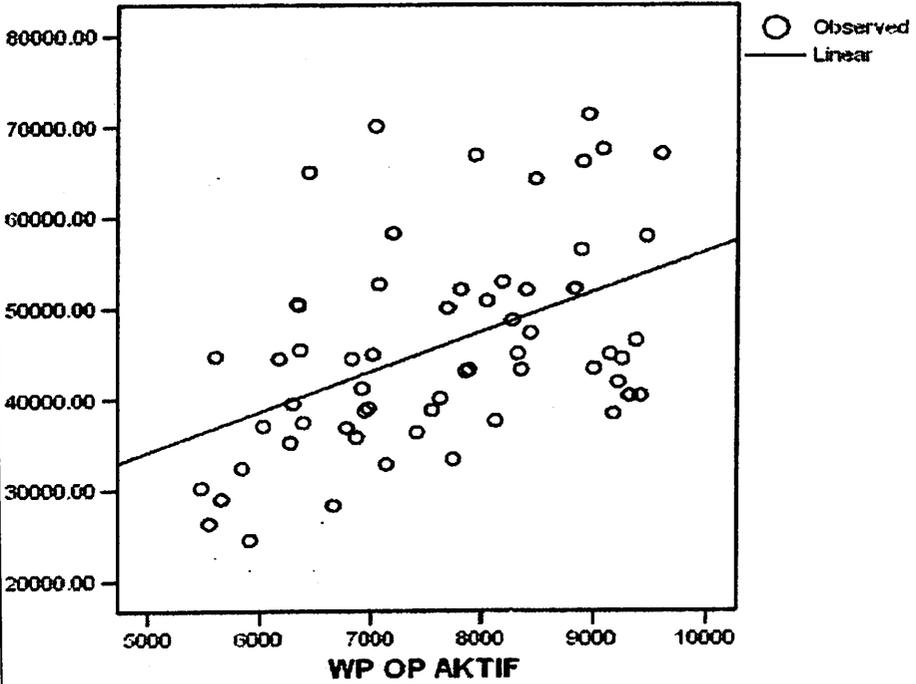


Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

- 2). Variabel Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif terhadap Penerimaan Pajak dapat dilihat pada Grafik 2. Hubungan ini mempunyai  $P\text{-value}=\text{sig.}$  sebesar 0,02% sehingga  $H_0$  ditolak, karena  $P\text{-value}=\text{sig.}$  lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

Grafik 4.

**PENERIMAAN PAJAK**



Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

Pengujian kedua asumsi yang telah dijelaskan diatas telah terpenuhi, sehingga semua data ini dapat dilakukan pengujian korelasi *Pearson Product Moment*. Pengujian korelasi *Pearson Product Moment* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.

## Correlations

		WP BADAN AKTIF	WP OR AKTIF	PENERIMAAN PAJAK
WP BADAN AKTIF	Pearson Correlation	1	.997**	.464**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	60	60	60
WPOP AKTIF	Pearson Correlation	.997**	1	.468**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	60	60	60
PENERIMAAN PAJAK	Pearson Correlation	.464**	.468**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian korelasi *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut:

- 1). Korelasi *Pearson Product Moment* Wajib Pajak Badan Aktif terhadap Penerimaan Pajak mempunyai  $r = 0,464$  dan  $P\text{-value} = sig = 0,000$ , sehingga  $H_0$  ditolak, karena  $P\text{-value} = sig.$  lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah ada hubungan linier yang substansial Wajib Pajak Badan Aktif terhadap Penerimaan Pajak.
- 2). Korelasi *Pearson Product Moment* Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif terhadap Penerimaan Pajak mempunyai  $r = 0,468$  dan  $P\text{-value} = sig = 0,000$ , sehingga  $H_0$  ditolak, karena  $P\text{-value} = sig.$  lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah ada hubungan linier yang substansial Wajib Pajak Badan Aktif terhadap Penerimaan Pajak.

### 3. Deskripsi Hubungan antara Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak

Data Surat Setoran Pajak terdapat di jumlah penerimaan pajak, karena data penerimaan pajak mencantumkan jumlah rupiah dan jumlah Surat Setoran Pajak. Kedua jumlah tersebut terdapat di setiap jenis pajak yang terlampir dalam penerimaan pajak. Tabulasi jumlah Surat Setoran Pajak berdasarkan jenis pajak dan bulan, misalnya bulan Januari 2002 tabulasi Surat Setoran Pajak setiap jenis pajak dan kemudian ditotal, bulan Februari 2002 tabulasi Surat Setoran Pajak setiap jenis pajak dan kemudian ditotal, dan seterusnya.

Gambaran umum Surat Setoran Pajak menjelaskan jumlah Surat Setoran Pajak dan pertumbuhannya. Tabulasi ini dilakukan dalam tahun per tahun untuk mengetahui jumlah Surat Setoran Pajak dan pertumbuhannya di setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, jumlah Surat Setoran Pajak dan

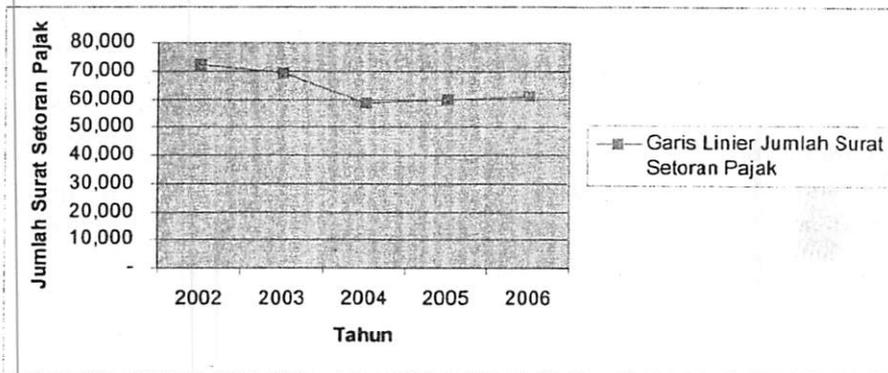
pertumbuhannya dapat dilihat dalam Tabel 5, sedangkan garis linier jumlah Surat Setoran Pajak dapat dilihat dalam Grafik 5. dan garis linier pertumbuhan Surat Setoran Pajak dapat dilihat dalam Grafik 6.

Tabel 5  
Data Jumlah Surat Setoran Pajak  
Tahun 2002 sampai dengan 2006

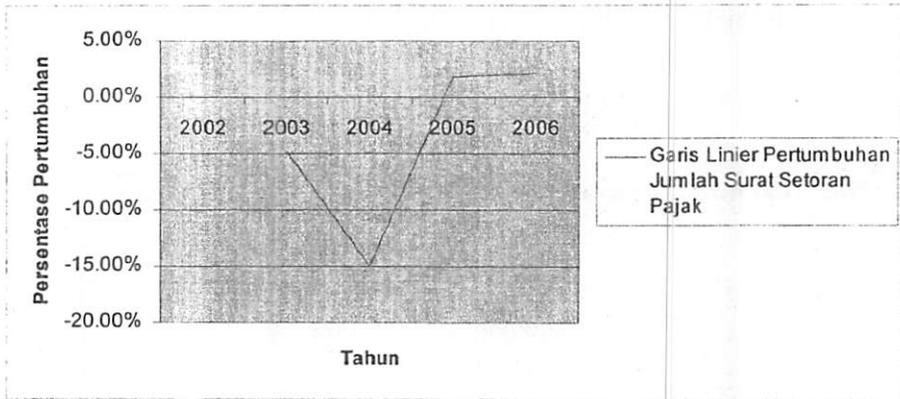
No.	Tahun	Surat Setoran Pajak (Lembar)	Pertumbuhan (%)
1.	2002	72,494	
2.	2003	69,008	-4.81%
3.	2004	58,644	-15.02%
4.	2005	59,691	1.79%
5.	2006	60,993	2.18%

Dengan dasar perhitungan jumlah Surat Setoran Pajak tahun 2002, pertumbuhan jumlah Surat Setoran Pajak paling besar terjadi di tahun 2006, yaitu sebesar 2,18% dengan jumlah Surat Setoran Pajak 60.993 lembar. Sedangkan pertumbuhan jumlah Surat Setoran Pajak paling kecil terjadi di tahun 2004, yaitu mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan sebesar -15,02% dengan jumlah Surat Setoran Pajak 58.644 lembar.

Grafik 5.  
Garis Jumlah Surat Setoran Pajak Tahun 2002 s.d. 2006



Grafik 6  
Garis Pertumbuhan Jumlah Surat Setoran Pajak Tahun 2002 s.d. 2006



Analisis Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak meliputi dua pengujian, yaitu:

#### 4. Pengujian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 6, dimana jumlah masing-masing data (Surat Setoran Pajak dan Penerimaan Pajak) adalah 60 (enam puluh), sehingga tidak ada data yang hilang. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata atau *mean*, nilai standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing data tersebut.

Tabel 6

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	60	5347.17	1034.875	3957	8132
PENERIMAAN PAJAK	60	45633.87	11356.09500	24520.03	71291.37

Sumber: Hasil *print-out* Program SPSS Versi 12

#### b. Pengujian Korelasi *Pearson Product Moment*

Sebelum data diuji dengan korelasi *Pearson Product Moment*, data diuji normalitasnya atau hubungan linieritasnya. Pengujian Normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	PENERIMAAN PAJAK
N			60	60
Normal Parameters	a <sup>b</sup>	Mean	5347.17	46633.8683
		Std. Deviation	1034.875	11356.09500
		Absolute	.204	.125
Most Extreme Differences		Positive	.204	.125
		Negative	-.120	-.082
		Kolmogorov-Smirnov Z	1.579	.985
Asymp. Sig. (2-tailed)		.014	.310	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian Normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* adalah sebagai berikut:

- 1). Surat Setoran Pajak mempunyai *P-value=sig.* sebesar 1,4% sehingga  $H_0$  ditolak, karena *P-value=sig.* lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang tidak berdistribusi normal.
- 2). Penerimaan Pajak mempunyai *P-value=sig.* sebesar 31,0% sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak, karena *P-value=sig.* lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.

Data Surat Setoran Pajak tidak berdistribusi normal, sehingga data tersebut dilakukan transformasi data. Kegunaan transformasi data adalah memodifikasi nilai-nilai data yang telah ada (Wahana Komputer, 2006). Data Surat Setoran Pajak yang tersedia dimodifikasi ke perhitungan logaritma (Ln) untuk mencari nilai logaritma natural (Wahana Komputer, 2006), supaya mendapatkan data yang berdistribusi normal. Untuk perhitungan logaritma Surat Setoran Pajak, perhitungannya menjadi Ln Surat Setoran Pajak; dan untuk perhitungan logaritma Penerimaan Pajak, perhitungannya menjadi Ln Penerimaan Pajak. Perhitungan logaritma menggunakan SPSS Versi 12 pada tebal *Transform*, menu *Compute*. Pengujian Normalitas *Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov)* dengan data hasil transformasi data logaritma dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Ln SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	Ln PENERIMAAN PAJAK
N			60	60
Normal Parameters	Mean		8.5676	10.6983
	Std. Deviation		.18017	.24788
Most Extreme Differences	Absolute		.168	.076
	Positive		.168	.076
	Negative		-.099	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		1.305	.591	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066	.876	

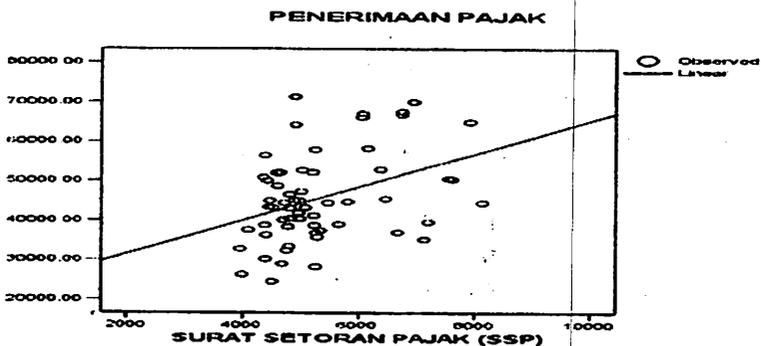
a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.

Kesimpulan Pengujian Normalitas Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) adalah sebagai berikut:

- 1). Surat Setoran Pajak mempunyai  $P\text{-value}=\text{sig.}$  sebesar 6,6% sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak, karena  $P\text{-value}=\text{sig.}$  lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.
- 2). Penerimaan Pajak mempunyai  $P\text{-value}=\text{sig.}$  sebesar 87,6% sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak, karena  $P\text{-value}=\text{sig.}$  lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.

Sedangkan hubungan linieritas dapat dilihat dari hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini hubungan linieritasnya yaitu variabel Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak dapat dilihat pada Grafik 7. Hubungan ini mempunyai  $P\text{-value}=\text{sig.}$  sebesar 0,024% sehingga  $H_0$  ditolak, karena  $P\text{-value}=\text{sig.}$  lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

Grafik 7



Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

Pengujian kedua asumsi yang telah dijelaskan diatas telah terpenuhi, sehingga semua data ini dapat dilakukan pengujian korelasi *Pearson Product Moment*. Pengujian korelasi *Pearson Product Moment* dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9

Correlations

		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	PENERIMAAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	Pearson Correlation	1	.385**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	60	60
PENERIMAAN PAJAK	Pearson Correlation	.385**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	60	60

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil *print-out* Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian korelasi *Pearson Product Moment* adalah korelasi *Pearson Product Moment* Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak mempunyai  $r = 0,385$  dan  $P\text{-value} = sig = 0,002$ , sehingga  $H_0$  ditolak, karena  $P\text{-value} = sig.$  lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulannya adalah ada hubungan linier yang rendah Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian hubungan antara Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama  $H_0$  ditolak, artinya jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak karena ada hubungan secara linier antara jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dengan rincian sebagai berikut:
  - 1). Ada hubungan linier yang substansial antara Wajib Pajak Badan Aktif terhadap Penerimaan Pajak. Hubungan tersebut mempunyai arah korelasi positif, yaitu semakin tinggi jumlah Wajib Pajak Badan Aktif, Penerimaan Pajak cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Wajib Pajak Badan Aktif yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak meliputi Wajib Pajak Badan Bukan Data Baru dan Wajib Pajak Badan Data Baru.
  - 2). Ada hubungan linier yang substansial antara Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif terhadap Penerimaan Pajak. Hubungan tersebut mempunyai arah korelasi positif, yaitu semakin tinggi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif, Penerimaan Pajak cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Wajib

Pajak Orang Pribadi Aktif yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Data Baru dan Wajib Pajak Orang Pribadi Data Baru.

Secara keseluruhan disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah, cenderung dapat meningkatkan penerimaan pajak di wilayahnya, sehingga Kantor Pelayanan Pajak tersebut melaksanakan program penyisiran atau kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang lebih terarah dan sistematis. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat dari tahun ke tahun.

- b. Hipotesis kedua  $H_0$  ditolak, artinya jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak karena ada hubungan linier antara Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak, meskipun hubungannya rendah. Hubungan tersebut mempunyai arah korelasi positif, yaitu semakin tinggi jumlah Surat Setoran Pajak, Penerimaan Pajak cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Oleh karena itu, peningkatan jumlah Surat Setoran Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah, cenderung dapat meningkatkan penerimaan pajak, meskipun peningkatannya rendah.

## Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal terkait dengan pencapaian penerimaan pajak, yaitu:

- a. Pelaksanaan penyisiran dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dapat dilanjutkan dan melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan berdasarkan Bank Data atau Simpul Data yang sebelumnya telah dilakukan *cross check* keberadaan dan kemampuan finansial Wajib Pajak. Keberhasilan implementasi penyisiran dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, jumlah data yang terkait dengan implementasi penyisiran terus ditingkatkan, salah satunya adalah daftar anggota belanja yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tertentu yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar.

- b. Indikator keberhasilan penyisiran adalah meningkatnya jumlah Surat Setoran Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dalam hasil penelitian ini, jumlah Surat Setoran Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak, sehingga dampak penyisiran terkait dengan pelaksanaan intensifikasi perpajakan. Namun, pengujian intensifikasi perpajakan yang terkait dengan penerimaan pajak tidak dilaksanakan dalam penelitian ini, karena keterbatasan pengumpulan data penelitian.

### Penelitian Lanjutan

Untuk memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan jelas, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan studi kasus pada pokok permasalahan yang sama di Kantor Pelayanan Pajak lainnya baik di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun di wilayah lainnya. Pengumpulan data dan metodologi penelitian dapat menggunakan penelitian yang sama supaya hasil penelitian lanjutan tersebut dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Perbandingan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hermawan, Asep. (2003). *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Judisseno, Remsky K. (2002). *Pajak dan Strategis Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia; Cetakan Ketiga*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pandiangan, Liberty. (2002). *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Santoso, Purbayu Budi dan Ashari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Tambunan, Sumihar Petrus. (2003). *SPT: Surat Pemberitahuan Pajak*. Jakarta: PT Kharisma Bintang Kreativitas Prima.